



# LAPORAN OUTPUT III

**RAPAT FLLAJ  
BULAN FEBRUARI 2023**



**PROGRAM HIBAH JALAN DAERAH  
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2023**



Rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait Pengujian Kendaraan Bermotor di Wilayah Karisidenan Solo Raya

**1. Undangan Rapat**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Silwangi Nomor 355 – 357 Semarang 50146 Telepon (024) 7604640, 7605660, 7605700  
Faksimile 024-7607697 Laman <http://www.perhubungan.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik : [perhubungan@jatengprov.go.id](mailto:perhubungan@jatengprov.go.id)

Semarang, 3 Februari 2023

Nomor : 009 / 03126  
Sifat : -  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Hal : Undangan

Kepada  
Yth. Daftar Terlampir  
di -

**T e m p a t**

Dalam rangka Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah, bersama ini kami mengharap kehadiran Saudara pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 7 Februari 2023  
Pukul : 10.00 WIB – selesai  
Tempat : Ruang Rapat Dinas Perhubungan Kota Surakarta,  
Jl. Menteri Supeno No. 7, Kota Surakarta, Jawa Tengah  
Acara : Rapat Forum LLAJ terkait Pengujian Kendaraan Bermotor di Wilayah Karesidenan Solo Raya

Demikian kami sampaikan, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Pih. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Sekretaris  
  
SYURYA DETA SYAFRIE, ST, MT  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19810606 200501 1 007



Rapat FLLAJ Februari 2023

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah

Lampiran : Surat Kepala Dinas Perhubungan  
Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal : 3 Februari 2023  
Nomor : 005/0312.6  
Hal : Undangan

---

Kepada Yth.:

1. Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III;
2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo;
7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri;
8. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta.





## 2. Daftar Hadir Rapat



### PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Siliwangi Nomor 355 – 357 Semarang 50146 Telepon (024) 7604640, 7605660, 7605700  
Faksimila 024-7607697 Laman <http://www.perhubungan.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik : [perhubungan@jatengprov.go.id](mailto:perhubungan@jatengprov.go.id)

#### DAFTAR HADIR


Hari : Selasa  
Tanggal : 7 Februari 2023  
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Dinas Perhubungan Kota Surakarta,  
Jl. Menteri Supeno No. 7 Kota Surakarta, Jawa Tengah  
Acara : Rapat Forum LLAJ terkait Pengujian Kendaraan Bermotor di Wilayah  
Karesidenan Solo Raya

NO	NAMA	INSTANSI	NO HP	JENIS KELAMIN	TANDA TANGAN
1.	EPPI	DISTUB JATENG	081228168058	L	1.
2.	Risjanto	BPSPPS JTS	085724528401	L	2.
3.	Henry SM.	DISTUB SURABAYA	081225445999	L	3.
4.	M-AMET	Distub B-A	082135385008		4.
5.	Heri S.	Distub BKL	0857047211517	L	5.
6.	TONI SRI BUNTORO	DISTUB SKH	08122981856	L	6.
7.	SUPRIYONO	DISTUB Klaten	08156840826	L	7.
8.	July.c.	DISTUB. JB	0812280405	L	8.
9.	Wahyu	DISTUB Wng	085291488011	L	9.
10.	Hanna al r.	DISTUB SKA	081329501300	L	10.
11.	JAROT ARI W	BPSPPwil III		L	11.
12.	Lena D.A	DISTUB H.	085776161375	P	12.
13.	Piri Dillio	DISTUB Koa	08122633372	L	13.
14.	Haryanto	—	08224412277	L	14.
15.	Aida Hurno	—	029935171965	L	15.
16.	Retro Endah	FLLAJ	085844077699	P	16.
17.	Dewi F	FLLAJ	082134535307	P	17.



Rapat FLLAJ Februari 2023

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah

NO	NAMA	INSTANSI	NO HP	JENIS KELAMIN	TANDA TANGAN
18.	BAYU	DISHUB SAATON	0857161222	L	18. 
19.					19.
20.					20.



### 3. Notulen Rapat



#### PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Siliwangi Nomor 355 – 357 Semarang 50146 Telepon (024) 7604640, 7605660, 7605700  
Faksimile 024-7607697 Laman <http://www.perhubungan.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [perhubungan@jatengprov.go.id](mailto:perhubungan@jatengprov.go.id)

#### NOTULEN RAPAT FORUM LLAJ TERKAIT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH EKS-KARESIDENAN SOLO RAYA

Rapat	: Rapat Forum LLAJ terkait Pengujian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Eks-Karesidenan Solo Raya
Hari/Tanggal	: Selasa, 07 Februari 2023
Jam	: 10.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Ruang Rapat Dinas Perhubungan Kota Surakarta
Pimpinan Rapat	: Erry Derima Ryanto, ATD, MT
Hadir Dalam Rapat	: Daftar Hadir Terlampir

#### Saran, Masukan dan Tanggapan dari Peserta Rapat :

1. Rapat dibuka Oleh Erry Derima Riyanto ATD, MT Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah menyampaikan sebagai berikut
  - Terkait retribusi Pengujian Kendaraan bermotor, menurut UU No. 1 Tahun 2022 dihilangkan/ tidak ada pungutan retribusi yang bersumber dari pengujian kendaraan bermotor, tetapi tetap melaksanakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor
  - Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Jasa Lainnya di Pemerintah Daerah ada poin yang dihapus pada UU No. 1 Tahun 2022
  - Terkait Retribusi Terminal tipe B dan Izin Trayek di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 akan disiapkan regulasi menyesuaikan UU No. 1/ 20222
2. Kabid Pengujian dan Perbengkelan Dishub Kota Surakarta Menyampaikan :
  - Amanat Undang-undang No. 1 Tahun 2022 peniadaan retribusi harus diimplementasikan. Kota Surakarta sudah membuat Naskah Akademik rancangan perda Retribusi dan Pajak Daerah, Surakarta berencana akan merubah nomenklatur menjadi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dengan biaya sama pada saat ini
  - Kesepakatan tidak ada numpang uji di Dishub se –Solo raya agar tidak terjadi kesemrawutan di lokasi uji , tetapi pada usulan dari masyarakat yang mengusulkan agar numpang uji di buka kembali karna banyak kendala dari masyarakat
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri menyampaikan Wonogiri sudah membahas terkait penghapusan retribusi, pemanfaatan aset daerah dapat dimasukkan retribusi jasa usaha, membuat kajian menyandingkan biaya pemeliharaan dalam setahun (non SDM) disandingkan dengan pendapatan. Minimal pendapatan sama dengan biaya pemeliharaan.
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar menyampaikan : Akan mengikuti rencana arah kebijakan di Dinas Perhubungan se Solo Raya





5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten menyampaikan :

- Tarif retribusi kalau bias disamakan apabila menggunakan pemanfaatan aset, karna tidak berpatokan dengan JBB dan kalau se Solo raya tarifnya sama, numpang uji diusulkan agar diaktifkan kembali untuk peningkatan pelayanan masyarakat,
- Terkait retribusi pengendalian lalu lintas akan di implementasikan di ruas jalan klaten yang dilewati Truk Galian C

6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo menyampaikan :

Untuk retribusi retribusi yang terdapat potensi untuk PAD dapat diusulkan pada raperda yang baru nantinya, Sukoharjo sudah membuat Perda tentang pajak dan retribusi dan sudah dimasukkan pemanfaatan BMD di raperda

7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali menyampaikan :

Perlu harmonisasi kepada level provinsi jateng (biro hukum) dan pemerintah pusat , agar rencana ini dapat diimplementasikan pada masing-masing kabupaten kota di Solo Raya.

8. Kesimpulan Hasil Rapat sebagai berikut :

- a. Terkait Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan se-wilayah Solo Raya mengadopsi Naskah Akademis yang disusun oleh Dinas Perhubungan Surakarta dengan merubah nomenklatur menjadi Retribusi Pemakaian alat Uji ( Rumpun Retribusi Jasa Usaha )
- b. Terkait dengan Nomenklatur Retribusi Pemakaian alat Uji akan dikaji oleh Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah apabila sudah diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi.
- c. Terkait dengan Numpang Uji se wilayah Solo Raya yang disepakati dihentikan sejak Bulan Februari 2022, akan dibahas tersendiri pada saat pertemuan IPKBI se wilayah Solo Raya

Surakarta, 07 Februari 2023

Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan

**ERRY DERIMA RYANTO, ATD, MT**

Pembina Tingkat (IV/b)

NIP. 19690114 199203 1 005



#### 4. Foto Kegiatan

##### DOKUMENTASI KEGIATAN

##### DOKUMENTASI KEGIATAN







Rapat FLLAJ Februari 2023

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah

Rapat Forum LLAJ terkait Optimalisasi Penyelenggaraan Angkutan Umum Orang di Provinsi Jawa Tengah dan Pembahasan Rencana Aksi Keselamatan sebagai tindak lanjut Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK)

## 1. Undangan Rapat



### PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Siliwangi Nomor 355 – 357 Semarang 50146 Telepon (024) 7604640, 7605660, 7605700  
Faksimile 024-7607697 Laman <http://www.perhubungan.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik : [perhubungan@jatengprov.go.id](mailto:perhubungan@jatengprov.go.id)

Semarang, 10 Februari 2023

Nomor : 005/03495  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : Undangan

Kepada

Yth. Terlampir

di -

**T e m p a t**

Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan menyelenggarakan Rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Rangka Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Provinsi Jawa Tengah, bersama ini kami mengharap kehadiran Saudara pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 14 Februari 2023  
Pukul : 10.00 WIB – selesai  
Tempat : Gedung Wahana Graha, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah  
Jl. Siliwangi No.357, Krapyak, Kota Semarang  
Acara : Rapat Forum LLAJ terkait Optimalisasi Penyelenggaraan Angkutan Umum Orang di Provinsi Jawa Tengah dan Pembahasan Rencana Aksi Keselamatan (RAK) sebagai tindak lanjut Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK).

Demikian kami sampaikan, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Pih. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Sekretaris

**SYURYA DETA SYAFRIE, ST, MT**

Pembina (IV/a)  
NIP. 19810606 200501 1 007



Rapat FLLAJ Februari 2023

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah

: Surat Kepala Dinas Perhubungan  
Lampiran : Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal : 10 Februari 2023  
Nomor : 005/03495  
Hal : Undangan

Kepada Yth.:

1. Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah u.p. Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Jateng;
2. Kepala BPTD Wilayah X Jateng dan DIY;
3. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
10. Ketua DPD Organda Provinsi Jawa Tengah;
11. Pimpinan PT. Jasa Raharja Persero Jawa Tengah;
12. Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I;
13. Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II;
14. Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III;
15. Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV;
16. Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V;
17. Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI;
18. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara;
19. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;
20. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang;
21. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora;
22. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali;
23. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes;
24. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap;
25. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Demak;
26. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan;
27. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara;
28. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar;
29. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen;
30. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal;
31. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
32. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus;
33. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang;
34. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pati;
35. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan;
36. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pemasang;
37. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga;
38. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo;
39. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang;
40. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang;
41. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen;
42. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo;
43. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal;
44. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung;
45. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri;
46. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo;
47. Kepala Dinas Perhubungan Kota Magelang;
48. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekalongan;



Rapat FLLAJ Februari 2023

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah

- 49. Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang;
- 50. Kepala Dinas Perhubungan Kota Salatiga;
- 51. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta;
- 52. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tegal;
- 53. Sdr. Dr. Alfa Narendra, ST, MT selaku Masyarakat Transportasi Indonesia Jawa Tengah;
- 54. Sdri. Lisa Fitriani, Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung Semarang Unissula;
- 55. Sdri. Florentina H.E.S, Pelaku Usaha Transportasi Intermoda.





## 2. Daftar Hadir Rapat



### PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Siliwangi Nomor 355 – 357 Semarang 50146 Telepon (024) 7604640, 7605660, 7605700  
Faksimile 024-7607697 Laman <http://www.perhubungan.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik : [perhubungan@jatengprov.go.id](mailto:perhubungan@jatengprov.go.id)

#### DAFTAR HADIR

Hari : Selasa  
Tanggal : 14 Februari 2023  
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Gedung Wahana Graha, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah,  
Jalan Siliwangi 355 – 357 Semarang  
Acara : Rapat Forum LLAJ terkait Optimalisasi Penyelenggaraan Angkutan Umum Orang di Provinsi Jawa Tengah dan Pembahasan Rencana Aksi Keselamatan (RAK) sebagai tindak lanjut Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK)

NO	NAMA	INSTANSI	NO HP	JENIS KELAMIN	TANDA TANGAN
1.	ERRY	DISHUB		L	1.
2.	BUDHI J	DISHUB KREDEK		L	2.
3.	Heri Sh	BPPT W.G	08122856779	L	3.
4.	Suhud jr	Dishub Zab. Ny	08156830-717	L	4.
5.	Alditya	Dishub Grobogan	0878 34 30 9672	L	5.
6.	Moro satripb	Dishub Bojonegara	085673883344	L	6.
7.	Rachman	Dishub Kal	081722006862	L	7.
8.	SUBUTIS	Dishub. Regal	081566846614	L	8.
9.	Agus G	BPTD X Jaky	081399580008	L	9.
10.	Srisatuti	Pidhub Salatiga	085229456715	P	10.
11.	Denavit	DISHUB ANTONIS	0921 120 1921	L	11.
12.	Bambang Zaini	BPPT Mie W		L	12.
13.	Rungmitr	BPPT M		L	13.
14.	Getats	Diluar Pruz	088326947676	L	14.
15.	Tamas	BPPT II	082729705596	L	15.
16.	Lalu S	Jasa Raharja		L	16.
17.	Jamuda M	-11-		L	17.
18.	Adom H	Jasa Raharja	081287009257	L	18.
19.	Iswahyud	Dishub Pro. Jawa	0815641078912	L	19.
20.	Tulia n.	PULRI	081233220113	P	20.



NO	NAMA	INSTANSI	NO HP	JENIS KELAMIN	TANDA TANGAN
21.	Tri Martono	Dishub Kel. Jng	081548710540	L	21.
22.	Rani Tri R	"	085640370505	P	22.
23.	R Jaka P	Dishub Kota Mgl	081227877113	L	23.
24.	M. PIPKJ-D	Dishub Kota Mgl	081298900643	L	24.
25.	Anif Kusniam	Dishub Kota Sng	081229702207	L	25.
26.	Eko PH	Dishub Sbl	081333955690	L	26.
27.	Fanygn.	Brebasan.		L	27.
28.	Fumad.	- . .		L	28.
29.	Abdi.s.	Dishub Kps	081321666971	L	29.
30.	Fanita	Bapenda	081326578686	P	30.
31.	Lambang K	BPSPP VI	081350837788	L	31.
32.	Arit R	Dishub Kbg	081326126524	L	32.
33.	PARMUI	DPU BAKSRE	08122563300	L	33.
34.	Jeni	DPU BAKSRE	08122563300	P	34.
35.	Septo WH	DISHUB KTN	085668158070	L	35.
36.	Boyor donas	BPSPP wil J	085290497909	L	36.
37.	Mgokjaya	Blok	085878009547	L	37.
38.	Dadan A.Sep	BPSPPwil I	085600260062	L	38.
39.	Sigit Pandu B	Bapend	08122563300	L	39.
40.	Abdul Raminis	BPSPP WIL R		L	40.
41.	R.H	Dishub dp.	08561912433	L	41.
42.	M. A. Akhdi	Dishub	08132615872	L	42.
43.	B Purwati	"	081592003353	L	43.
40.	sohri	DISHUBAO	08135010022	L	40.
51.	yuli	-		L	51.
52.	Muadi	DISHUB PATI	081242240216	L	52.
53.	FADAN	konstas pat	085864701991	L	53.





### 3. Notulen Rapat



#### PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Siliwangi Nomor 355 – 357 Semarang 50146 Telepon (024) 7604640, 7605660, 7605700  
Faksimile 024-7607697 Laman <http://www.perhubungan.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [perhubungan@jatengprov.go.id](mailto:perhubungan@jatengprov.go.id)

#### NOTULEN RAPAT FORUM LLAJ

- Rapat : Rapat Forum LLAJ terkait Optimalisasi Penyelenggaraan Angkutan Umum Orang di Provinsi Jawa Tengah dan Pembahasan Rencana Aksi Keselamatan (RAK) sebagai tindak lanjut Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK).
- Hari/Tanggal : Selasa, 14 Februari 2023
- Jam : 10.00 WIB s/d selesai
- Tempat : Gedung Wahana Graha, Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Jl. Siliwangi No. 355-357 Semarang
- Hadir Dalam Rapat :
1. BPTD Wilayah X Jateng dan DIY;
  2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  3. Sadan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
  4. Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah u.p. Kasubdit Kamsel Dirlantas Polda Jateng;
  5. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
  6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
  7. Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah;
  8. Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
  9. BPSPP Wilayah I;
  10. BPSPP Wilayah II;
  11. BPSPP Wilayah III;
  12. BPSPP Wilayah IV;
  13. BPSPP Wilayah V;
  14. BPSPP Wilayah VI;
  15. Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara;
  16. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;
  17. Dinas Perhubungan Kabupaten Batang;
  18. Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora;
  19. Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali;
  20. Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes;
  21. Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap;
  22. Dinas Perhubungan Kabupaten Demak;
  23. Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan;
  24. Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara;
  25. Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar;
  26. Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen;
  27. Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal;
  28. Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
  29. Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus;
  30. Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang;
  31. Dinas Perhubungan Kabupaten Pati;
  32. Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan;
  33. Dinas Perhubungan Kabupaten Peralang;
  34. Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga;
  35. Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo;
  36. Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang;





37. Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang;
38. Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen;
39. Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo;
40. Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal;
41. Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung;
42. Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri;
43. Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo;
44. Dinas Perhubungan Kota Magelang;
45. Dinas Perhubungan Kota Pekalongan;
46. Dinas Perhubungan Kota Semarang;
47. Dinas Perhubungan Kota Salatiga;
48. Dinas Perhubungan Kota Surakarta;
49. Dinas Perhubungan Kota Tegal;
50. Ketua DPD Organda Provinsi Jawa Tengah;
51. Pimpinan PT. Jasa Raharja Persero Jawa Tengah;
52. Sdr. Dr. Alfa Narendra, ST, MT selaku MTI Jawa Tengah;
53. Sdr. Lisa Fitriani, Fakultas Teknik Unissula;
54. Sdr. Florentina H.E.S, Pelaku Usaha Transportasi Intermoda.

Pelaksanaan :

1. Rapat Forum LLAJ terkait Optimalisasi Penyelenggaraan Angkutan Umum Orang di Provinsi Jawa Tengah dan Pembahasan Rencana Aksi Keselamatan (RAK) sebagai tindak lanjut Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK), dibuka oleh Rita Toba, SE, MM selaku moderator yang dilanjutkan paparan oleh narasumber dan dilanjutkan sesi tanya jawab.
2. Erry Derima Ryanto ATD, MT Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan sebagai tindak lanjut RUNK, sesuai dengan PP nomor 37 Tahun 2017 dan Perpres No 1 tahun 2022 disampaikan untuk menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi dan Kabupaten / Kota. Terkait dengan RAK yang diutamakan terkait Budaya LLAJ yang mengutamakan keselamatan. Penyusunan RAK menggunakan tahun dasar 2010 dengan Indikator Kinerja Utama, Indeks Fatalitas per 100.000 penduduk sebagai indeks faktor kesehatan dan Indeks Fatalitas per 10.000 kendaraan sebagai indeks faktor lalu lintas. Draf RAK Provinsi Jawa Tengah menggunakan data dasar tahun 2017, dan draf Peraturan Gubernur RAK Provinsi Jawa Tengah sedang dalam tahap penyusunan. Sasaran dari masing masing pilar, pilar 1 dengan 8 program, pilar 2 dengan 8 program, pilar 3 dengan 4 program, pilar 4 dengan 9 program, dan pilar 5 dengan 3 program dan setiap instansi dapat berperan sebagai instansi pendukung program
3. Heribertus Slamet Widodo, ATD, MM, Kepala Bidang Angkutan Jalan menyampaikan pelaksanaan Forum LLAJ sudah dilaksanakan namun implementasinya belum maksimal. Permasalahan yang terjadi diantaranya terkait dengan kewenangan daerah, pelayanan di daerah terhadap transportasi belum siap dengan keadaan zaman (kondisi kearifan lokal) khususnya di bidang perijinan (teknologi), angkutan AKDP yang kurang diminati oleh masyarakat, time table dari pelaksanaan AKDP (ngetem) menjadi penyebab beralihnya masyarakat menggunakan kendaraan pribadi. Saat ini angkutan dengan usia maksimal secara otomatis menjadi plat putih, namun di lapangan banyak kendaraan ilegal yang kembali mejadi plat kuning, sehingga perlu adanya penertiban angkutan ilegal di jalan. Rekomendasi baik angkutan penumbang



- maupun barang di kembalikan ke kabupaten/kota. Evaluasi jaringan trayek sesuai dengan jalur trayeknya
4. Sulistiono, Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah  
Semua produk hukum wajib di validasi oleh kemendagri., di tahun 2023 produk hukum juga wajib sinkronisasi dan harmonisasi di kementerian ham hal ini berlaku juga untuk peraturan peraturan di bidang perhubungan dan sesuai dengan kewenangannya. Penyusunan RAK Provisi diantaranya berisi sasaran pemprov, arah kebijakan staregis dan rencana pendanaan.
  5. AKP. Marita, Ditkamsel Polda Jateng  
Penegakan hukum di provinsi jawa tengah telah dilakukan, Operasi keselamatan dengan 7 sasaran sesuai dengan RUNK tentang keselamatan berlalu lintas, Helm, sabuk keselamatan, kecepatan, perilaku penggunaan kendaraan dan penggunaan kenalpot brong. Penegakan hukum berupa etle dan mobile dan tetap dilakukan tilang manual (kasat mata) pelanggaran tidak memakai Helm.
  6. Tanya jawab, saran dan masukan
    - 1) Lambang Kurniawan, SE, MM (Kepala BPSPP Wilayah VI)  
Pilar 3 Keselamatan Kendaraan terkait dengan Kegaitan Penegakan Hukum yang dilakukan di lapangan dalam pelaksanaanya kurang maksimal, terkait dengan kendaraan Angkutan mengenai perijinan yang dilakukan hanya sebanyak 43 % dan pemasalahan terkait administrasi yang tidak tertib. Upaya pencegahan yang telah dilakukan diantaranya sosialisasi di terminal dan jembatan timbang, namun kendaraan yang tidak tertib admistrasi masih banyak.  
Masukan: melakukan *upgrade* pada sitrayek, dengan memberikan sanksi adminstrasi pada kendaraan dengan administrasi yang sah dengan memanfaatkan teknologi agar bisa diakses semua masyarakat.
    - 2) Gunadi, BPTD X Jateng – DIY  
Penyusunan RAK sebagai tindak lanjut RUNK, terfokus pada kewenangannya pada Pilar 3 upaya yang telah dilakukan oleh BPTD diantaranya :
      - a) Angkutan Pariwisata dengan melakukan kunjungan langsung ke (PO) daerah untuk melakukan rekap data administrasi dengan melibatkan instansi terkait, namun kedalanya informasi pengurusan ijin dan pelaku baru untuk pengusaha belum tersosialisasikan. Dan informasi mengenai sosialisasi spionam dan oss ke perusahaan angkutan.
      - b) Penegakan Hukum di terminal wajib dilakukan rampchek sebelum berangkat dari terminal, namun kendalanya AKDP tidak masuk Terminal Tipe A.
    - 3) Sri Satuti, Dinas Perhubungan Kota Salatiga  
Berharap angkutan umum dapat mengurai kemacetan di daerah, namun adanya permasalahan adanya operasioanl AKDP berkaitan dengan data, namun update data masih dalam proses. Diharapkan adanya kolaborasi dengan provinsi karena perijinan ada di provinsi dan diharapkan adanya ada terminal tipe B. Apakah ada penetapan SK trayek antara Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga ? Perijinan Angkutan Kota merupakan kewenangan dari Daerah masing masing, namun yang ditemui di lapangan plat nomor tersebut dari Kabupaten Semarang, dan Adanya Ojek Onile Lokal karena bukan merupakan transportasi kendaraan umum.





- 4) Arif, Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali
    - a) Kelayakan kendaraan dilakukan dengan uji KIR, namun adanya numpang uji yang dilarang menyebabkan kendaraan untuk melakukan numpang uji di swasta, akan menjadi permasalahan baru.
    - b) Penghapusan retribusi KIR yang terjadi memberi masukan untuk mengganti dengan retribusi aset daerah apakah memungkinkan, karena berhubungan dengan pendapatan daerah ?
    - c) Forum Galian C, permasalahan ini terjadi diberbagai daerah, terkait permasalahan perijinan OSS, sehingga diharapkan untuk penertiban tersebut bagaimana ?
  - 5) Rohman, Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap  
Bagaimana toleransi pada angkutan umum, yang sudah mau mengikuti aturan namun terhalang dengan syarat (15 tahun/) dan Permasalahan dengan adanya Bentor terkait penyumbang kecelakaan yang terjadi juga, serta ijin taryek yang jumlahnya semakin menurun ?  
Rekomendasi KNKB kuning ubah nama lima tahunan, dan perpanjangan sesuai dengan edaran.
  - 6) Tri Mantoro, Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang  
Forum LLAJ diharapkan dapat melakukan pertemuan secara teratur, berkaitan dengan keselamatan upaya yang telah dilakukannya oleh perhubungan (Uji KIR) namun perlu adanya kolaborasi dengan instansi lain dalam pengawasan. Uji KIR dapat dijadikan prioritas dalam pengawasan dalam upaya mengurangi kecelakaan, sinergi dan koordinasi dengan organisasi lain perlu dilakukan untuk meningkatkan upaya dalam meningkatkan keselamatann.
  - 7) Sigit, BAPPEDA Jawa Tengah.  
Upaya keselamatan pada pilar 3 berupa program sosialisasi keselamatan dll. Inovasi yang telah dilakukan pengemudi sadar keselamatan, kendaraan sadar keselamatan perlu meningkatkan pengetahuan dari penumpang yang berkeselamatan. Perlu adanya bantuan sosialisasi dari kabupaten / kota kepada pengguna kendaraan untuk menggunakan kendaraan umum sebagai alternatif moda utama dalam bertransportasi.  
Adanya pembahasan mengenai penentuan DRK yang akan ditangani, dengan mengutamakan yang memiliki korban MD banyak dan Prioritas Kecelakaan.
  - 8) Agus, DPD Organda  
Banyaknya Peraturan baru yang menyebabkan kendala, karena adanya ketumpang tindih antara angkutan yang berijin dan tidak berijin / Illegal (odong – odong)
7. Tanggapan :
- 1) Heribertus Slamet Widodo, ATD, MM, Kepala Bidang Angkutan Jalan  
Rekomendasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan sertifikat yang terverifikasi. Kendaraan overtime (provinsi) dipastikan akan berubah menjadi putih (ada / tidak rekomendasi). Update data merupakan kewajiban dari bidang angkutan dan sedang dalam proses, akan diteruskan ke kabupaten / kota.
  - 2) Erry Derima Ryanto, ATD, MT Kepala Bidang lalu Lintas Jalan  
Penumpang yang berkeselamatan menjadi mendukung atau ketersediaan dari pengguna yang berkeselamatan. Prioritas DRK akan di bahas. Peningkatan keselamatan dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah akan dilakukan





- Rampchek di bus BRT dan apa ada yang terlibat dalam kecelakaan. Surat edaran mengenai pengangkutan Galian sudah ditentukan oleh Kementerian PUPR.
- 3) AKP. Marita, Ditkamsel Polda Jateng  
ODOL sudah dilakukan penindakan dari masing-masing wilayah, Penegakan hukum, akan dilakukannya sosialisasi dan operasi kepolisian menunggu dari surat dari Dinas Perhubungan untuk melakukan penindakan bersama.  
Odong – odong ( Kereta Kelinci) tidak boleh beroperasi di jalan raya karena tidak memenuhi persyaratan dari teknis dan keselamatan.
  - 4) Sulistiono, Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah  
Kalo tidak ada regulasi yang sesuai perlu untuk didiskusikan, apabila akan membuat aturan diperbolehkan akan tetapi tidak bertentangan dengan undang undang lebih tinggi, kesusilaan. Penghapusan retribusi daerah
  - 5) Yulia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, Ijin dibedakan dari tingkat resikonya, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor tersebut.  
08112918083.



Tindak lanjut sebagai berikut :

1. Berdasarkan amanat Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota untuk menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi dan Kabupaten / Kota.
2. RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah, sedangkan RAK LLAJ Kabupaten / Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati / Walikota. Dokumen perencanaan keselamatan LLAJ Kementerian / Lembaga untuk periode 5 tahun.
3. Dengan melihat berbagai permasalahan Angkutan Umum yang disampaikan peserta rapat, maka dapat ditindaklanjuti dengan :
  - a. Perlu dilakukan sosialisasi dan pembinaan secara periodic kepada perusahaan angkutan AKDP terkait dengan perijinan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Pemenuhan Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan umum (SMK AU);
  - b. Untuk permasalahan kesulitan perijinan dengan layanan system yang selalu terupgrade, maka Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota dapat bersurat / memberikan Informasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah (DPMPTSP) untuk selanjutnya dilakukan pendampingan / *clicking* klinik, adapun kontak person yang dapat dihubungi 09112918083;
  - c. Dalam hal penertiban angkutan illegal Ditlantas Polda Jateng akan mengkoordinasikan dengan Polres – Polres di wilayah Jawa Tengah untuk dapat dilakukan penertiban; dan
  - d. Perlu adanya *upgrade* aplikasi Si Trayek dengan replica aplikasi Kemenhub Spionam, sehingga masyarakat dapat memilih armada yang akan digunakan sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan.

Mengesahui,  
Bidang Lalu Lintas Jalan

**ERRY DERIMA RYANTO, ATD. MT**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP : 19690114 199203 1 005

Semarang, 15 Februari 2023  
Notulis

Retno Endah Wahyu W, S.Tr.Tra



#### 4. Foto Kegiatan

##### DOKUMENTASI KEGIATAN

